



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 27 Tahun 2015

Seri E Nomor 17

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 27 Tahun 2015

Seri E

Tanggal 21 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat kelurahan yang bersangkutan guna menilai keberhasilan pembangunan Kelurahan perlu dilakukan Perlombaan Kelurahan;
- b. bahwa agar perlombaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Pedoman Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BOGOR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari camat.
8. Pembangunan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
9. Perlombaan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintah daerah, bersama masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
10. Profil Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kelurahan yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan, dan masalah yang dihadapi;
11. Tingkat perkembangan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintah kelurahan serta pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan;
12. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda, cendekiawan, dan adat yang bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan.

13. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di wilayah kelurahan.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kelurahan untuk selanjutnya disingkat TP PKK kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga.
18. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan lurah.
19. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

20. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perlombaan Kelurahan tingkat kecamatan diselenggarakan oleh Camat.
- (2) Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota diselenggarakan oleh Walikota.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 3

- (1) Peserta perlombaan kelurahan tingkat kecamatan adalah seluruh kelurahan dari setiap kecamatan.

- (2) Peserta perlombaan Kelurahan Tingkat Kota adalah juara pertama perlombaan kelurahan Tingkat Kecamatan.
- (3) Peserta perlombaan Kelurahan Tingkat Propinsi adalah juara pertama perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bogor.
- (4) Peserta perlombaan Tingkat Nasional adalah juara pertama perlombaan Kelurahan Tingkat Propinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Perlombaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Perlombaan Kelurahan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada bulan Februari.
- (3) Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (4) Perlombaan Kelurahan Tingkat Propinsi dilaksanakan paling lambat bulan Juni – Juli.
- (5) Perlombaan Kelurahan Tingkat Nasional dilaksanakan paling lambat bulan Juli – Agustus.

BAB III PENILAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penilaian perlombaan kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.
- (2) Penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan klasifikasi data kelurahan calon juara.
- (3) Penilaian perlombaan kelurahan tingkat Kota Bogor dilakukan selain tingkat perkembangan sebagaimana ayat (1) juga dilakukan dengan klasifikasi indikator penilaian tingkat Kota Bogor.

Bagian Kedua Penetapan Juara

Pasal 6

Penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara beerjenjang dan berkelanjutan mulai dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.

Pasal 7

- (1) Juara Pertama perlombaan kelurahan tingkat kecamatan adalah kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan kelurahan Tingkat Kecamatan.

- (2) Juara Pertama perlombaan kelurahan Tingkat Kota adalah kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan kelurahan Tingkat Kota.
- (3) Juara Pertama perlombaan kelurahan tingkat propinsi adalah kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan kelurahan Tingkat Propinsi.
- (4) Juara perlombaan kelurahan tingkat nasional adalah kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian perlombaan kelurahan Tingkat Nasional.

Pasal 8

Juara Pertama perlombaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi peserta dalam pertemuan para juara Pertama perlombaan Kelurahan Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional pada bulan Agustus di Jakarta.

Bagian Ketiga Indikator Penilaian

Pasal 9

Indikator penilaian perlombaan kelurahan terdiri dari tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

Paragraf 1
Tingkat Kecamatan

Pasal 10

Indikator penilaian perlombaan kelurahan tingkat Kecamatan, meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan masyarakat;
- c. ekonomi masyarakat;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pemerintahan;
- g. lembaga kemasyarakatan;
- h. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 11

- (1) Indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil olahan data tingkat perkembangan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Tingkat Kota

Pasal 12

- (1) Indikator penilaian perlombaan kelurahan Tingkat Kota Bogor, disamping indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditambah dengan indikator lainnya yaitu :

- a. penyusunan profil kelurahan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dan di *update*;
 - b. jumlah pemberdayaan/partisipasi masyarakat
 - c. tingkat ketaatan lurah terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. penampilan/performance
 - e. penguasaan materi;
 - f. perencanaan tematik kelurahan/batas wilayah;
 - g. inovasi kelurahan;
 - h. ketepatan waktu dalam menyampaikan persentase;
- (2) Indikator dan skor penilaian Perlombaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengolahan data pada saat perlombaan dengan menggunakan aplikasi pembobotan pada setiap indikatornya.
- (3) Indikator dan skor penilaian perlombaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3 **Hasil Penilaian**

Pasal 13

- (1) Hasil akhir skor merupakan penggabungan dari indikator yang tercantum dalam Pasal 10 ditambah dengan hasil pembobotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 14

- (1) Tim penilai Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan anggotanya terdiri dari unsur perangkat kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian perlombaan kelurahan untuk menentukan juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bogor anggotanya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor dan Tim Penggerak PKK Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap juara pertama perlombaan kelurahan Tingkat Kecamatan dan menentukan juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bogor.

BAB V PENETAPAN JUARA

Pasal 16

- (1) Juara perlombaan kelurahan tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Juara perlombaan kelurahan Tingkat Kota Bogor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penghargaan Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan diberikan oleh Camat.
- (2) Penghargaan Juara Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bogor diberikan oleh Walikota Bogor.

Pasal 18

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Walikota.
- (2) Pelaksanaan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan perlombaan kelurahan Tingkat Kecamatan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan kelurahan Tingkat Kota.

Pasal 21

- (1) Gubernur dan Walikota melakukan pembinaan terhadap Kelurahan yang telah menjadi juara dalam Perlombaan Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui pembinaan program, pemberian stimulan dan bentuk lain sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui pemberian prioritas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan memberdayakan masyarakat secara terpadu.
- (4) Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian dana pembinaan khusus.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang berkaitan dengan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan dan Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan yang telah berlangsung tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan pada Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Oktober 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.
N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 21 OKTOBER 2015
TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PERLOMBAAN
KELURAHAN TINGKAT KOTA BOGOR

A. INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN PERLOMBAAN **KELURAHAN**

I. Indikator Penilaian Perlombaan Kelurahan

a. Orbitasi

1. Orbitasi Wilayah

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1.	Kelurahan	1. > 6 Jam
		2. 5-6 jam
		3. 3-4 jam
		4. 1-2 jam
		5. < 1 jam
		6. Ada di Pusat Kecamatan
		7. Bantaran sungai
		8. Rawan banjir (tetapi bukan bantaran sungai)
		9. Bebas banjir

2. Jarak Geografis

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1	Ke gunung km
2	Ke laut km
3	Ke sungai km
4	Ke pinggiran Hutan km
5	Ke pasar km
6	Ke pelabuhan km
7	Ke bandara km
8	Ke terminal km
9	Ke tempat hiburan km
10	Ke tempat wisata km
11	Ke kantor polisi/militer km
12	Ke perbatasan kabupaten km
13	Ke perbatasan propinsi km
14	Ke perbatasan Negara km
15	Ke stasiun km

3. Letak Geografis

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1	Kawasan Hutan	Ada/tidak
2	Kawasan Tambang	Ada/tidak
3	Kawasan Pantai	Ada/tidak
4	Kawasan Perbukitan/ pegunungan	Ada/tidak
5	Kawasan Persawahan	Ada/tidak
6	Kawasan Perkebunan	Ada/tidak
7	Kawasan Peternakan	Ada/tidak

1	2	3
8	Kawasan Industri kecil/ rumah tangga	Ada/tidak
9	Kawasan Saluran Listrik tegangan Tinggi (SUTET)	Ada/tidak
10	Kawasan Rawan Banjir	Ada/tidak
11	Kawasan Industri/ Pabrik	Ada/tidak
12	Kawasan Perkantoran	Ada/tidak
13	Kawasan Rawa	Ada/tidak
14	Kawasan Perdagangan	Ada/tidak
15	Kawasan Kumuh	Ada/tidak
16	Kawasan Jasa Hiburan	Ada/tidak
17	Kawasan Wisata	Ada/tidak
18	Kawasan Bantaran Sungai	Ada/tidak
19	Kawasan Longsor	Ada/tidak
20	Kawasan.....	Ada/tidak
21	Kawasan.....	Ada/tidak

4. Jarak Ke Pusat Pemerintahan

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	
1	2	3	
1	Ke pemerintahan Kecamatan	Km
2	Ke pemerintahan Kabupaten/ kota	Km
3	Ke Pemerintah Provinsi	Km

b. Data Penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	INDIKATOR	JUMLAH	
		TH 1	TH 2
1	2	3	4
1	0-12 Orang Orang
2	> 1 - < 5 Tahun Orang Orang
3	≥ 5 - < 7 Tahun Orang Orang
4	≥ 7 - ≤ 15 Tahun Orang Orang
5	> 15 - 56 Tahun Orang Orang
6	> 56 Tahun Orang Orang

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender

No	INDIKATOR	JUMLAH	
		TH 1	TH 2
1	2	3	4
1	Jumlah Penduduk Orang Orang
2	Jumlah Laki-Laki Orang Orang
3	Jumlah Perempuan Orang Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga KK KK

c. Data Tingkat Perkembangan

1. Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas	1. Jumlah penduduk buta huruf orang orang
		2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat orang	... orang
		3. Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat orang orang
		4. Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat orang orang
		5. Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat orang orang
		6. Jumlah penduduk tamat D-1 orang orang
		7. Jumlah Penduduk tamat D-2 orang orang
		8. Jumlah penduduk tamat D-3 orang orang

2.	Wajib Belajar 9 tahun dan putus sekolah	1. Jumlah Penduduk tamat D-3 orang orang
		2. Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah orang orang
		3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah orang orang
3.	Prasarana Pendidikan	1. Jumlah SLTA/Sederajatbuah buah
		2. Jumlah SLTP/Sederajatbuah buah
		3. Jumlah SD/Sederajatbuah buah
		4. Lembaga Pendidikan agamabuah buah
		5. Lembaga pendidikan lain (Kursus/sejenis nya)buah buah

2. Kesehatan Masyarakat

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Kematian bayi	1. jumlah bayi lahir orang orang

		2. jumlah bayi mati orang orang
2.	Gizi dan Kematian Balita	1. Jumlah balita orang orang
		2. Jumlah balita gizi buruk orang orang
		3. Jumlah balita gizi baik orang orang
		4. Jumlah balita mati orang orang
3.	Cakupan Imunisasi	1. Cakupan imunisasi polio orang orang
		2. Cakupan imunisasi DPT-1 orang orang
		3. Cakupan imunisasi BCG orang orang
4.	Angka harapan hidup	Angka harapan hidup
5.	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Hidup	1. Total rumah tangga dapat akses air bersihRTRT
		2. Pengguna air sumur pompaRTRT
		3. Pengguna sumur galiRTRT
		4. Pengguna mata airRTRT
		5. Pengguna hidran umumRTRT
		6. Pengguna penam pung air hujanRTRT

		7. Pengguna embunRTRT
		8. Pengguna perpipaanRTRT
		9. lainnyaRTRT
		10.Total rumah tangga tidak mendapat air bersihRTRT
6.	Kepemilikan Jamban	1. Total rumah tangga mempunyai jamban/ WCRTRT

3. Ekonomi Masyarakat

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Pengangguran	1.jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun orang orang
		2.Jumlah penduduk usia 15-56 orang orang orang
		3.Penduduk wanita usia 15-56 tahun menjadi ibu rumah tangga orang orang
		4.Penduduk usia >15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja orang orang

2.	Pendapatan	Sumber Pendapatan		
		1. Pertanian	Rp.....	Rp.....
		2. Kehutanan	Rp.....	Rp.....
		3. Perkebunan	Rp.....	Rp.....
		4. Peternakan	Rp.....	Rp.....
		5. Perikanan	Rp.....	Rp.....
		6. Perdagangan	Rp.....	Rp.....
		7. Jasa	Rp.....	Rp.....
		8. Usaha Penginapan/ Hotel dan sejenisnya	Rp.....	Rp.....
		9. Pariwisata	Rp.....	Rp.....
		10. Industri rumah tangga	Rp.....	Rp.....
3.	Kelembagaan Ekonomi	1. Pasar	Ada/tidak	Ada/tidak
		2. Lembaga Koperasi/ sejenisnya	Ada/tidak	Ada/tidak
		3. BUMdes	Ada/tidak	Ada/tidak
		4. Toko/kios	Ada/tidak	Ada/tidak
		5. Warung makan	Ada/tidak	Ada/tidak
		6. Angkutan	Ada/tidak	Ada/tidak
		7. Pangkalan ojek, becak, delman atau sejenisnya	Ada/tidak	Ada/tidak
4.	Tingkat Kesejahteraan	1. Jumlah KeluargaKelKel
		2. Jumlah Keluarga PrasejahteraKelKel

		3. Jumlah keluarga sejahtera 1KelKel
		4. Jumlah Keluarga Sejahtera 2KelKel
		5. Jumlah Keluarga Sejahtera 3KelKel
		6. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plusKelKel

4. Keamanan dan Ketertiban

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1	Konflik Sara	1. Konflik antar kelompok kasus kasus
		2. Konflik antar etnis kasus kasus
		3. Konflik berbau agama kasus kasus
2	Perkelahian	1. Kasus Perkelahian kasus kasus
		2. Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa kasus kasus

1	2	3	4	5
		3. Kasus perkelahian yang meninggalkan luka parah kasus kasus
3	Pencurian dan Perampokan	1. Kasus pencurian/ perampokan kasus kasus
		2. Kasus pencurian/ perampokan dengan kekerasan kasus kasus
		3. Kasus Pencurian/ perampokan dengan pelaku dari desa setempat kasus kasus
4	Perjudian	Kasus Perjudian kasus kasus
5	Narkoba	1. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku penduduk setempat kasus kasus
		2. Jumlah Kasus Penduduk yang menjadi korban narkoba kasus kasus
6	Prostitusi	Kasus Protistusi kasus kasus

1	2	3	4	5
7	Pembunuhan	1. Jumlah kasus pembunuhan kasus kasus
		2. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk setempat kasus kasus
		3. Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk desa setempat kasus kasus
8	Kejahatan Seksual	1. Jumlah kasus perkosaan kasus kasus
		2. Jumlah kasus perkosaan pada anak kasus kasus
		3. Jumlah kasus kehamilan di luar nikah kasus kasus
9	Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	1. Kekerasan terhadap isteri kasus kasus
		2. Kekerasan terhadap suami kasus kasus

		3. Kekerasan terhadap anak kasus kasus
		4. Kekerasan terhadap anggota keluarga lain kasus kasus
10	Penculikan	Jumlah kasus penculikan kasus kasus
11	Partisipasi masyarakat dalam Keamanan Swakarsa	1. Jumlah Pos siskamling unit unit
		2. Jumlah anggota hansip orang orang
		3. Jumlah kelompok ronda Kel Kel

5. Partisipasi Masyarakat

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Pemilihan Umum	1. Legislatif		
		• Jumlah penduduk menggunakan hak pilih orang orang
		• Jumlah penduduk menggunakan hak pilih orang orang
		2. Presiden/wakil Presiden orang orang

		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk memiliki hak pilih orang orang
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk memiliki hak pilih orang orang
2.	Pemilihan Kepala Daerah	1. Gubernur/Wakil Gubernur orang orang
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk memiliki hak pilih orang orang
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk menggunakan hak pilih orang orang
		2. Walikota/Wakil Walikota orang orang
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk memiliki hak pilih orang orang

6. Pemerintahan

1	Pemerintahan Kelurahan	1. Sarana Prasarana		
		<ul style="list-style-type: none"> Gedung Kantor 	Baik/rusak	Baik/rusak
		<ul style="list-style-type: none"> Gedung Pertemuan 	Ada/tidak	Ada/tidak
		<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Kelurahan 	Lengkap/tidak	Lengkap/tidak

	• Mesin tik/ komputer	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Kendaraan dinas lurah	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Struktur Organisasi	Ada/tidak	Ada/tidak
	2. Keuangan		
	• APBD Kelurahan	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Belanja Pembangunan	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Bantuan/ Hibah Lainnya	Ada/tidak	Ada/tidak
	3. Akuntabilitas		
	• Kota Pengaduan Masyarakat	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Laporan Kinerja tahunan	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Laporan akhir jabatan Lurah	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Papan informasi pelayanan	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Locket Pelayanan	Ada/tidak	Ada/tidak
	4. Administrasi		
	• Buku registrasi pelayanan	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Buku Profil Kelurahan	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Administrasi Keuangan	Ada/tidak	Ada/tidak
	• Kartu uraian tugas	Ada/tidak	Ada/tidak

		• Administrasi penduduk	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Administrasi Pembangunan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Buku data lembaga kemasyarakatan	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Buku Registrasi umum	Ada/tidak	Ada/tidak
		• Peta wilayah Kelurahan	Ada/tidak	Ada/tidak

7. Lembaga Kemasyarakatan

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KEBERADAAN
1	2	3	4
1.	Organisasi Perempuan	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
2.	Organisasi Pemuda	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
3.	Organisasi Profesi	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
4.	Organisasi Bapak	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
5.	LKMD atau sebutan lain	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak

1	2	3	4
6.	Kelompok Gotong Royong	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
7.	Karang Taruna	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
8.	Lembaga Adat	Lembaga adat dalam pengelolaan hutan	Ada/Tidak
		Lembaga adat dalam pengelolaan pertanian/irigasi	Ada/Tidak
		Lembaga adat dalam pengelolaan laut/pantai	Ada/Tidak
		Lembaga adat dalam penyelesaian konflik warga	Ada/Tidak
		Lembaga Adat perkawinan	Ada/Tidak
		Lembaga adat lainnya	Ada/Tidak

8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1	Realisasi 10 Program Pokok PKK	1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasilakegkeg
		2. Gotong Royongkegkeg
		3. Pangankegkeg
		4. Sandangkegkeg
		5. Perumahan dan tata laksana rumah tanggakegkeg
		6. Pendidikan dan keterampilankegkeg
		7. Kesehatankegkeg
		8. Pengemban Kehidupan Berkoprasikegkeg
		9. Pelestarian lingkungan Hidupkegkeg
		10. Perencanaan sehatkegkeg
2.	Organisasi PKK	Kelengkapan :		
		1. Kelompok Kerja	Ada/Tidak	Ada/Tidak

		2. Kelompok Dasa Warsa	Ada/Tidak	Ada/Tidak
--	--	------------------------	-----------	-----------

II. Skor Penilaian Perlombaan Kelurahan

No	INDIKATOR		PENILAIAN	SKOR
I. Pendidikan Masyarakat				5 - 100
1	Presentase Penduduk Tamat SLTP	Bila meningkat kurang dari 1%		1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$		4
		$> 2\% - \leq 4\%$		6
		$> 4\% - \leq 6\%$		12
		$> 6\% - \leq 8\%$		18
		$> 8\%$		20
2	Presentase Penduduk Buta Huruf	Bila menurun kurang dari 1%		1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$		4
		$> 2\% - \leq 4\%$		6
		$> 4\% - \leq 6\%$		12
		$> 6\% - \leq 8\%$		18
		$> 8\%$		20
3	Realisasi Wajar 9 Tahun	Bila meningkat kurang dari 5%		1
		$\geq 5\% - \leq 6\%$		4
		$> 6\% - \leq 8\%$		6
		$> 8\% - \leq 10\%$		12
		$> 10\% - \leq 12\%$		18
		$> 12\%$		20
4	Angka Putus Sekolah	Bila menurun kurang dari 1%		1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$		4
		$> 2\% - \leq 4\%$		8

			> 4% - ≤ 6%	16
			>6%	20
	5	Sarana Pendidikan	Tidak ada peningkatan	1
			Ada Peningkatan	20
II Kesehatan Masyarakat				9 - 150
	1	Kematian Bayi	Bila menurun kurang dari 10%	1
			≥ 10% - ≤ 15%	4
			> 15% - ≤ 20%	8
			> 20% - ≤ 25%	12
			> 25% - ≤ 30%	18
			> 30%	20
	2	Kematian Balita	Bila menurun kurang dari 10%	1
			≥ 10% - ≤ 15%	4
			> 15% - ≤ 20%	8
			> 20% - ≤ 25%	12
			> 25% - ≤ 30%	18
			> 30%	20
	3	Gizi Balita	Bila Balita bergizi buruk menurun kurang dari 5%	1
			≥ 5% - ≤ 10%	4
			> 10% - ≤ 15%	8
			> 15% - ≤ 20%	12
			> 20% - ≤ 25%	18
			> 25%	20
4	Cakupan Imunisasi			
		Polio – 3		
		Bila meningkat kurang dari 5%	1	
		≥ 5% - ≤ 10%	2	
		> 10% - ≤ 15%	4	
		> 15% - ≤ 20%	6	
	> 20% - ≤ 25%	8		

		> 25%	10
	DPT - 1	Bila meningkat kurang dari 5%	1
		≥ 5% - ≤ 10%	2
		> 10% - ≤ 15%	4
		> 15% - ≤ 20%	6
		> 20% - ≤ 25%	8
		> 25%	10
	BCG	Bila meningkat kurang dari 5%	1
		≥ 5% - ≤ 10%	2
		> 10% - ≤ 15%	4
		> 15% - ≤ 20%	6
		> 20% - ≤ 25%	8
		> 25%	10
5	Angka Harapan Hidup	Bila meningkat kurang dari 1 tahun	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	8
		> 4% - ≤ 6%	12
		> 6% - ≤ 8%	16
		> 8%	20
6	Cakupan Pemenuhan Air Bersih	Bila meningkat kurang dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	8
		> 4% - ≤ 6%	12
		> 6% - ≤ 8%	16
		> 8%	20
7	Pemilikan Jamban	Bila Pemilikan Jamban Kurang dari 1%	1
		≥ 1% - ≤ 2%	4
		> 2% - ≤ 4%	8

			> 4% - ≤ 6%	12
			> 6% - ≤ 8%	16
			> 8%	20
III Ekonomi Masyarakat				4 - 40
	1	Presentase Pengangguran	Bila menurun kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
	2	Pendapatan Perkapita	Bila meningkat kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
	3	Lembaga Ekonomi	Bila menurun	1
			Bila tetap	5
			Bila meningkat	10
	4	Tingkat Kesejahteraan	Bila KK prasejahtera menurut kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
> 8%			10	
IV Keamanan dan Ketertiban				11 - 55
1	Konflik Sara	Bila meningkat	1	
		Bila menurun/tidak ada	5	
2	Perkelahian	Bila meningkat	1	

			Bila menurun/tidak ada	5
3	Pencurian / Perampokkan		Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
4	Perjudian		Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
5	Kasus Narkoba		Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
6	Portitusi		Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
7	Pembunuhan		Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
8	Kejahatan Seksual		Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
9	Kekerasan dalam rumah tangga		Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
10	Penculikan		Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
11	Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan		Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
V. Partisipasi Masyarakat				44 - 70
1.	Pemilihan Umum		Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
	Pemilihan Presiden		Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
	Pemilihan		Bila < 75%	8

	Legislatif	Bila $\geq 75\%$	10
2.	Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur	Bila $< 75\%$	8
		Bila $\geq 75\%$	10
3.	Pemilihan Walikota/Wakil Walikota	Bila $< 75\%$	8
		Bila $\geq 75\%$	10
4.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Bila Partisipasi masyarakat menurun	1
		Bila partisipasi masyarakat meningkat	5
		Bila Partisipasi laki-laki menurun	1
		Bila Partisipasi laki-laki meningkat	5
5.	Gotong Royong	Bila kegiatan Gotong Royong Menurun	1
		Bila kegiatan gotong royong meningkat	5
VI Pemerintahan			6 - 70
	<i>A. Pemerintah Kelurahan</i>		
1.	Sarana Prasarana	Bila kurang dari 3 sarana	1
		Bila ada 3-5 macam sarana	5
		Bila ada 6 sarana	10
2.	Administrasi Kelurahan	Bila kurang dari 3-4 macam	1
		Bila ada 4-7 macam	5
		Bila ada 8-9 macam	10
3.	Keuangan Kelurahan	Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6

		> 6% - ≤ 8%	8
		> 8%	10
		Bila belanja pembangunan meningkat kurang dari 1 Tahun	1
		≥ 1% - ≤ 2%	2
		> 2% - ≤ 4%	4
		> 4% - ≤ 6%	6
		> 6% - ≤ 8%	8
		> 8%	10
		Bila Hibah meningkat kurang dari 1 tahun	1
		≥ 1% - ≤ 2%	2
		> 2% - ≤ 4%	4
		> 4% - ≤ 6%	6
		> 6% - ≤ 8%	8
		> 8%	10
5.	Akuntabilitas	Bila tidak ada	0
		Bila ada 1 s.d 2	2
		Bila ada 3 s.d 5	5
		Bila semua ada	10
VII Lembaga Kemasyarakatan			0 - 45
1	Organisi Perempuan	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
2	Organisasi Pemuda	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
3	Organisasi Profesi	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
4	Organisasi Bapak	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2

		Bila ada dan aktif	5
5	LKMD atau sebutan lain	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
6	Kelompok Gotong Royong	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
7	Karang Taruna	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
8	Lembaga Adat	Bila tidak ada	0
		Bila hanya ada 1	2
		Bila hanya ada 2	4
		Bila ada 3 lembaga	6
		Bila ada 4 lembaga	8
		Bila ada \geq 4 lembaga	10
VIII. Kesejahteraan Keluarga / PKK			1 - 25
1	Realisasi Program Pokok PKK	Terealisasi 2 Kegiatan	1
		Terealisasi 3 - 4 kegiatan	5
		Terealisasi 5 - 6 kegiatan	10
		Terealisasi 7 - 8 kegiatan	15
		Terealisasi 9 - 10 kegiatan	20
2	Kelengkapan Organisasi	Tidak ada	0
		Ada 1 Kelengkapan	3
		Ada 2 Kelengkapan	5

B. KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN KELURAHAN

- I. Dilihat dari tingkat perkembangan masyarakat kelurahan selama 2 (Dua) tahun terakhir berdasarkan indikator:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan masyarakat;
 - c. Ekonomi Masyarakat;
 - d. Keamanan dan ketertiban;
 - e. Partisipasi masyarakat;
 - f. Pemerintahan;
 - g. Lembaga kemasyarakatan; dan
 - h. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

- II. Inisiatif dan kreativitas daerah dalam keberdayaan masyarakat dan kelurahan:
 - a. Visi dan Misi pemberdayaan masyarakat;
 - b. Kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - c. Kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan pemerintah kelurahan;
 - d. Eksistensi Institusi pemberdayaan masyarakat;
 - e. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparat yang menangani pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - f. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - g. Kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan;

- h. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan.
- III. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan:
- a. Pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan;
 - b. Tindak lanjut kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Perencanaan Partisipatif;
 - d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- IV. Kinerja Camat, Lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kelurahan:
- a. Pemahaman terhadap potensi, tingkat perkembangan kelurahan serta penghambat pengembangan masyarakat kelurahan;
 - b. Strategi pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

C. LAPORAN PELAKSANAAN

**LAPORAN PELAKSANAAN PERLOMBAAN KELURAHAN DI
KECAMATAN/KOTA/PROVINSI
TAHUN**

=====

- I. PENDAHULUAN
 - A. Umum
 - B. Dasar

C Sistematika

II. SASARAN DAN SISTEM PENILAIAN

- A. Sasaran Penilaian
- B. Sistem Penilaian
- C. Tertib Penilaian

III. PELAKSANAAN PERLOMBAAN

- A. Pelaksanaan dan penilaian perlombaan kelurahan tingkat kecamatan, kota dan provinsi.
- B. Hasil yang dicapai, meliputi:
Kelurahan juara pertama, jura-juara perlombaan kelurahan tingkat kecamatan, kota serta provinsi, yang diuraikan dalam: nama kelurahan, hasil pembangunan yang menonjol dan skor perlombaan kelurahan.

IV. POTENSI PENGEMBANGAN UNGGULAN

V. JENIS PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN

VI. PEMBIAYAAN

- A. Pemerintah Daerah
- B. Lain -lain

VII. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

- A. Permasalahan yang timbul
- B. Upaya Pemecahan

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan

B. Saran

IX. PENUTUP

X. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan Camat/Walikota/Gubernur tentang Penetapan Kelurahan Juara Perlombaan Kelurahan.
- B. Buku profil kelurahan juara-juara perlombaan kelurahan, riwayat dan lurah.
- C. Lain-lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 21 OKTOBER 2015
**TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN
PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BOGOR**

INDIKATOR PENILAIAN LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA

A. DEFINISI

1. Profil Kelurahan
Profil Kelurahan meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi Kelurahan dan Tingkat Perkembangan Kelurahan yang tersusun dalam website kelurahan.
2. Jumlah Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
Melihat seberapa banyak Jumlah Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat. Indikator ini untuk melihat inisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah kelurahan dan dapat terjadi apabila masyarakat nya ikut berpartisipasi.
3. Ketaatan Lurah terhadap Peraturan Perundang-undangan
Indikator yang digunakan adalah kegiatan yang dilakukan/dihasilkan oleh Lurah dan produk hukum yang dihasilkan oleh Lurah.
4. *Performance*
Penampilan yang dinilai pada saat Lurah menyampaikan pemaparan/presentasi meliputi 3 (tiga) indikator yaitu :
 - a. Penampilan secara keseluruhan menarik.

- b. Menggunakan atribut pakaian dengan benar.
 - c. Menggunakan intonasi suara dengan pas.
5. Penguasaan Materi
Indikator penguasaan materi meliputi 3 (tiga) hal yaitu:
- a. Faham terhadap bahan yang disampaikan.
 - b. Dapat menjawab pertanyaan dari Tim Penilai.
 - c. Tidak gugup dan dapat mengendalikan emosi.
6. Perencanaan Tematik
Perencanaan Tematik yaitu adanya batas wilayah kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Inovasi Kelurahan
Inovasi Kelurahan adalah Kelurahan yang mempunyai ide/gagasan baru yang membawa manfaat bagi orang lain atau masyarakat. Dibuktikan dengan adanya kegiatan fisik/program kerja
8. Ketepatan Waktu dalam menyampaikan Presentasi
Dapat menyampaikan materi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

B. RINCIAN INDIKATOR PENILAIAN

NO.	DASAR PENILAIAN	JUMLAH NILAI	BOBOT PENILAIAN (%)	INDIKATOR PENILAIAN	TOTAL PEMBOBOTAN
1	2	3	4	5	6
1	Profil Kelurahan :				
	a. sudah disusun dalam <i>website</i>	50	10%	a. Data Dasar Keluarga b. Potensi Kelurahan	

	b. sudah disusun dan di <i>update</i>	100		c. Tingkat Perkembangan Kelurahan	
2	Jumlah Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat				
	a. 1 s/d 2	20	5%	Ada inisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi dan dapat terjadi apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi	Jumlah nilai dikali bobot penilaian
	b. > 2 s/d 3	30			
	c. > 3 s/d 4	40			
	d. > 4 s/d 5	55			
	e. > 5	100			
3	Ketaatan Lurah Terhadap Peraturan Perundang-undangan				
	a. Rapat Kelurahan				
	1) Rapat < 12 kali/tahun	30	5%	kegiatan yang dilakukan/ dihasilkan oleh Lurah	
	2) Rapat > 12 kali/tahun	100			
	b. Pembuatan SK Lurah				
	1) 1 s/d 2 pertahun	20	5%	Produk hukum yang dihasilkan oleh Lurah	
	2) > 3 s/d 4 pertahun	40			
	3) > 4 s/d 5 pertahun	60			
	4) > 5 pertahun	100			
	c. Bina Wilayah Kelurahan				

	1) 1 s/d 5 kali	50	5%	kegiatan yang dilakukan/ dihasilkan oleh Lurah	
	2) > 5 kali	100			
4	Performance				
	a. Kurang Baik	25	10%	a. Penampilan secara keseluruhan menarik b. Menggunakan atribut pakaian dengan benar c. Menggunakan intonasi suara dengan pas	Jumlah nilai dikali bobot penilaian.
	b. Cukup Baik	60			
	c. Baik	75			
	d. Baik Sekali	100			
5	Penguasaan Materi				
	a. Kurang Baik	25	10%	a. Faham terhadap bahan yang disampaikan b. Dapat menjawab pertanyaan dari Tim Penilai c. Tidak gugup dan dapat mengendalikan emosi	
	b. Cukup Baik	60			
	c. Baik	75			
	d. Baik Sekali	100			
6	Perencanaan Tematik				
	a. Ada	50	5%	Dapat menunjukkan dasar aturannya	
	b. Ada dan ada dasar hukumnya	100			

1	2	3	4	5	6
7	Inovasi Kelurahan				
	a. Tidak Ada	0	20%	a. Mempunyai ide/gagasan baru yang membawa manfaat bagi orang lain atau masyarakat. b. Dibuktikan dengan adanya kegiatan fisik/program kerja	
	b. 1s/d 2	75			
	c. > 2	100			
8	Ketepatan Waktu dalam menyampaikan Presentasi				
	a. < 20 menit	75	5%	Dapat menyampaikan materi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.	
	b. 20 menit	100			
	c. > 20 menit	50			
TOTAL			100%		

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA